

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan. Sehingga harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan (BKKBN, 2009).

Indonesia pada dasarnya merupakan suatu Negara yang baru berkembang, dalam melakukan perkembangannya Indonesia melakukan berbagai upaya pembangunan, baik pembangunan dari sumber daya alamnya ataupun dari pembangunan sumber daya manusianya. Kekuatan pembanguan sebuah Negara terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki. Menurut Plato 300 SM menekankan bahwa kestabilan penduduk (dalam konteks rasio dan lahan) merupakan faktor yang penting untuk mencapai faktor kesempurnaan manusia. Plato merupakan sosok tokoh pemikir awal yang mengemukakan doktrin bahwa kualitas manusia merupakan hal yang terpenting dibandingkan dengan kuantitasnya. Sehingga jumlah sumber daya manusia yang besar tidak selalu menjadi kekuatan dalam pembangunan apabila tidak disertainya dengan kualitas yang memadai. Negara yang memiliki penduduk dengan kualitas tinggi akan mempercepat tercapainya pertumbuhan, dan sebaliknya Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kualitasnya yang rendah akan menjadi beban di dalam pembangunan. (Sari dkk, 2016).

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini sesuai dengan hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat, pada tahun 2000 jumlah penduduk di Indonesia 206.264.595 jiwa, pada tahun 2010 diperoleh bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237.556.363 jiwa (BPS, 2010). Menurut data survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI), tahun 2012, TFR (Total Fertility Rate) sebesar 2,6 anak perwanita usia subur yang artinya akan ada 2-3 anak per wanita usia subur, angka ini masih jauh dari target yaitu 2,1 di tahun 2015 (BKKBN, 2013).

Kuantitas dan kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah, ditambah dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat sedangkan wilayah untuk tempat tinggal tidak semakin luas, sehingga hal ini memerlukan suatu control untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam mengatasi masalah dan tantangan pembangunan kependudukan ini, pemerintah telah menyiapkan solusinya yaitu program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya nyata yang diterapkan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan upaya menurunkan fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu indikator kesuksesan program KB ini adalah pencapaian peserta KB yang semakin tinggi baik itu dari pencapaian peserta KB aktif maupun peserta KB baru. Dalam mencapai kesuksesan program KB tersebut bila melihat besarnya jumlah kelahiran melalui perencanaan keluarga dengan menggunakan kontrasepsi terutama setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Sehingga penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran dapat memberikan kontribusi besar untuk tercapainya dan terlaksananya program KB ini. (BKKBN, 2015).

Promosi keluarga berencana merupakan tanggapan praktis utama dalam menghadapi masalah kependudukan. Dalam dasawarsa yang lalu, terdapat minat dan usaha yang luar biasa giatnya dalam program keluarga berencana yang diprakarsai oleh Pemerintah. Merencanakan keluarga yang dahulunya merupakan masalah pribadi atau kelompok-kelompok suka rela, kini cepat berubah menjadi masalah umum, dan keprihatinan terhadap implikasi-implikasi sosial ekonomi dari pertumbuhan penduduk yang juga meningkat.

Beberapa masalah yang menjadi sorotan dalam tujuan KB berdasarkan RENSTRA (Rencana Strategis) 2005-2009 yang meliputi keluarga dengan anak ideal, keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga berketahanan, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, serta penduduk yang tumbuh seimbang, maka program gerakan keluarga berencana ditantang untuk dapat mengajak masyarakat dan institusi lainnya untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dengan baik. (BKKBN, 2006).

Lembaga pemerintahan non kementerian ini terus berupaya melakukan tindakan guna mewujudkan misi yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada setiap masyarakat serta mewujudkan keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan kampanye-kampanye kepada seluruh masyarakat. BKKBN pernah sukses dengan slogan “dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja”. Namun, berbagai pihak menganggap bahwa slogan ini cukup melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, BKKBN terus berupaya mencari alternatif agar program keluarga berencana dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. BKKBN juga terus melakukan inovasi guna mewujudkan visi untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk pada 2015. (Natsir, 2013).

Berdasarkan perhitungan BKKBN, jika masyarakat di Indonesia tidak sadar akan pentingnya keikutsertaan dalam menjalankan program KB, diperkirakan dalam 9 tahun yang akan datang tepatnya tahun 2021, penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta jiwa manusia. Ledakan penduduk merupakan masalah yang masih erat kaitannya dengan masalah Keluarga Berencana yang akan menimbulkan berbagai permasalahan, yang diantaranya, pengangguran meningkat, dan kemiskinan tidak dapat terkendali. (BKKBN, 2016).

Jumlah keluarga banyak yang tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu malapetaka. Berbagai kasus penelantaran anak, anak bermasalah hukum, fenomena anak jalanan, trafficking dan KDRT merupakan diantara malapetaka tersebut. Laju pertumbuhan penduduk diharapkan dapat ditekan sehingga Negara dapat menghemat triliyunan rupiah untuk biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu dengan jumlah kelahiran yang terkendali, target untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita dapat dengan mudah terselesaikan. (Men,Kes RI, 2013).

Program KB harus dilaksanakan secara intensif untuk menurunkan angka fertilitas dan membudayakan norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Salah satu zona dalam NKKBS adalah zona tentang jumlah anak yang sebaiknya

dimiliki yaitu 2 anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. Hambatan dalam pelaksanaan program pembudayaan NKKBS di masyarakat disebabkan karena adanya pandangan orang tua terhadap anak dalam keluarga, bahwa anak tidak saja merupakan kebanggaan orang tua tetapi dibalik kebanggaan-kebanggaan itu tersembunyi harapan-harapan yang dibebankan diatas pundak anaknya. Dengan pelaksanaan program KB secara intensif selama 20 tahun untuk membudayakan NKKBS, maka diharapkan terjadi perubahan pola pikir masyarakat tentang idealisme jumlah anak dimana mendidik dan memelihara jauh lebih penting dari pada menambah jumlah anak. (BKKBN, 2006).

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, pemerintah telah dan sedang melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Berbagai masalah kependudukan tersebut meliputi antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, penduduk usia muda yang besar, dan kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah.

Dalam pelaksanaan Program KB Nasional di Kecamatan Nganjuk pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, seimbangnya kuantitas dan kualitas penduduk masih terkendala dengan tingginya penduduk miskin. Secara makro ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan, kemiskinan alami terjadi akibat pengaruh sumber daya alam yang terbatas, mengakibatkan rendahnya perkembangan ekonomi, sulitnya memperoleh bahan kebutuhan, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam pengendalian ekonomi dan kurang memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Selain itu dalam ukuran kemiskinan nantinya peneliti akan menggunakan tolak ukur konsep kemiskinan menurut Prof. Sajogyo, dimana masyarakat dikatakan miskin atau tak-miskin dapat dilihat dari ukuran pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan nilai tukar beras perorang pertahun didalam keluarga. Nilai tukar beras disetarakan dengan harga beras di desa tempat penelitian. Tolak ukur nilai beras untuk

golongan miskin di pedesaan kurang dari atau sama dengan 320 kg beras/ orang / tahun. Jika ≥ 320 kg beras/ orang / tahun berarti dapat dikatakan berkecukupan.

Dalam Program KB Nasional kelompok keluarga tak-miskin kurang lebih dapat diindikasikan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan fisik minimal. Dalam keluarga tidak miskin juga diindikasikan ketika mereka dengan mudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam tahap sejahtera. Dimana dalam kelompok keluarga tak-miskin ini, dapat memenuhi semua kebutuhan baik dari segi pangan, sandang, papan, pendidikan dan juga kesehatan. Kelompok keluarga tak-miskin dapat memenuhi dengan mudah segala kebutuhan fisik maupun non fisik. Pada dasarnya masyarakat yang sadar akan pentingnya dan faham akan kegunaan bahkan implikasi dari kontrasepsi yang telah digunakan setara dengan kedudukan, status sosial dan juga faktor pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi pendidikan, semakin tingginya status sosial yang didapatkan seseorang maka akan lebih faham akan kegunaan dari alat kontrasepsi yang dipilih dan mengimplikasikan dalam kesehatannya. Karena pada dasarnya setiap pengguna memiliki kecocokan sendiri-sendiri dalam menggunakan kontrasepsi yang dipilih.

Dalam program keluarga berencana pada dasarnya adalah untuk mendorong dan memperkuat masyarakatnya dalam keikutsertaan dan pemahaman dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Pelaksanaan program keluarga berencana sendiri tidak terpacu pada tingkatan perekonomian maupun status sosial yang dimiliki masyarakatnya. Karena pada dasarnya pelaksanaan program KB ini ditujukan untuk semua masyarakat tanpa mengenal golongan.

Dari pemaparan dan berdasarkan kondisi diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor Sosial Ekonomi Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Keikutsertaan Program Keluarga Berencana, Petani Miskin Dan Tak-Miskin Di Desa Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, penulis akan mengungkap dan meneliti lebih mendalam lagi akan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam ber KB. Karena pada dasarnya kesadaran dari pasangan usia subur untuk dapat mengatur dengan baik

jarak kelahiran akan sangat membantu akan tumbuh kembang suatu Negara. Selain itu peneliti nantinya juga akan melakukan suatu penelitian mendalam mengenai perbedaan keikutsertaan dan kesadaran masyarakat miskin dan tak-miskin dalam keberhasilan program keluarga berencana. Karena pada dasarnya program KB yang telah berada dibawah kekuasaan pemerintah ini menetapkan program untuk semua golongan tanpa adanya perbedaan antara masyarakat kelas atas maupun kelas bawah, dengan maksimal memiliki 2 anak cukup, laki-laki ataupun perempuan sama saja. Dan pemerintah juga telah mengalirkan banyak dana untuk masyarakat miskin untuk pemenuhan alat kontrasepsi gratis bagi mereka yang tidak mampu dengan maksud untuk mengurangi laju angka kelahiran

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan kasus yang ada ditengah-tengah masyarakat yang telah dipaparkan dan dituangkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pasangan Usia Subur (PUS) penduduk miskin lebih sedikit jumlahnya dari pada Pasangan Usia Subur (PUS) penduduk tak-miskin dalam keikutsertaan program keluarga berencana?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program keluarga berencana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Pasangan Usia Subur (PUS) penduduk miskin lebih sedikit jumlahnya dari pada Pasangan Usia Subur (PUS) penduduk tak miskin dalam keikutsertaan program keluarga berencana.
2. Untuk mendiskripsikan Faktor-faktor yang menyebabkan Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program keluarga berencana.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian “Analisis Faktor Sosial Ekonomi Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam

Keikutsertaan Program Keluarga Berencana, Petani Miskin Dan Tak-Miskin Di Desa Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

a. Teoritis

1. Sebagai suatu bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program Keluarga Berencana.
2. Untuk menambahkan khazanah keilmuan dalam bidang kesehatan masyarakat yang dikaji dalam ilmu sosiologi.

b. Praktis

1. Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam pemberian informasi keilmuan.
2. Memberikan gambaran tentang Analisis Faktor Sosial Ekonomi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam keikutsertaan program keluarga berencana, pekerja petani miskin dan tak-miskin di desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.